



**BUPATI BUTON UTARA**  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 172 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim;

b. bahwa yang namanya atau tersebut jabatan dalam instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5470);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- A. Tim Penyusun :
1. Mengumpulkan data atau bahan serta melakukan pembahasan sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
  2. Melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
  3. Bertanggungjawab kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas.
- B. Sekretariat Tim Penyusun :
1. Membantu dan memfasilitasi Tim dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah.
  2. Mendokumentasikan data atau bahan sehubungan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 21 -01- 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa di Buranga;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 172 TAHUN 2020

TANGGAL : 21 - 09 - 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2020.

A. TIM PENYUSUN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim.

No	Nama/Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000



### 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000

### 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanahan

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Pertanahan	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000



7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honor per 3 bulan (Rp)
1	Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
2	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah	900.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	900.000
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	800.000
5	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Wakil Ketua	800.000
6	Kabag Hukum Setda	Sekretaris	750.000
7	Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara	Tenaga Ahli/Anggota	750.000
9	Kasubbag Produk Hukum Daerah	Anggota	500.000
10	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi	Anggota	500.000
11	Staf Bagian Hukum Setda	Anggota	300.000

#### B. SEKRETARIAT TIM PENYUSUN

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Sekretariat	Besarnya honor (Rp)
1	Fathiyatul Asrariyah A,SH	Staf Bagian Hukum Setda	Ketua	-
2	LaOde Syafrudin, S.Si	Bendahara Setda	Anggota	400.000
3	Sri Astuti, S.Si.	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
4	Sriyanti	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
5	Wa Ode Asria, S.H.	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
6	Dewianti	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
7	Yeli Oktora	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
8	Eriati, S.Pd	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000
9	Zarlan, S.H.	Pegawai Kontrak Setda	Anggota	390.000

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN